

PERAN ASESMEN KEBUTUHAN DALAM OPTIMALISASI PERENCANAAN PENDIDIKAN DI ERA MERDEKA BELAJAR

Farraz Reannisa¹, Hasianna Lorenta², Syifa Nur Aghnia³,
Luthfia Amni Rismiyati⁴, Sulistiyana⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Magister Administrasi Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat

[¹farraz.reannisa@gmail.com](mailto:farraz.reannisa@gmail.com), [²annalorenta@gmail.com](mailto:annalorenta@gmail.com),
[³aghniasyifa.nrn@gmail.com](mailto:aghniasyifa.nrn@gmail.com), [⁴luthfiaa33@gmail.com](mailto:luthfiaa33@gmail.com), [⁵sulis.bk@ulm.ac.id](mailto:sulis.bk@ulm.ac.id)

ABSTRACT

This study aims to examine the strategic role of needs assessment in the educational planning process, particularly within the context of the Merdeka Belajar (Freedom to Learn) policy. In an education system that is continuously undergoing transformation, needs assessment serves as a crucial foundation for designing planning that is relevant, adaptive, and based on the actual conditions of students and educational institutions. The research uses a descriptive qualitative approach through a literature review of various relevant scientific sources. The findings show that needs assessment is capable of identifying gaps between the ideal and actual conditions in various aspects of education, such as student competencies, teacher readiness, and the availability of learning infrastructure. The Merdeka Belajar policy provides schools and teachers with greater autonomy in designing contextual curricula and learning processes. However, without proper needs assessment, educational planning risks being misaligned with on-the-ground realities. The study also reveals that the implementation of needs assessment in schools still faces several challenges, including limited teacher competence, time constraints, and weak institutional support. Therefore, strengthening strategies are needed, such as teacher training, the development of practical assessment instruments, and the integration of assessment results into school planning documents. Thus, needs assessment not only functions as a tool for identifying problems but also as a foundation for effective decision-making in educational planning that prioritizes quality and equitable learning. This research is expected to contribute to the development of educational policy and practice that is more responsive to actual needs in the era of Merdeka Belajar.

Keywords: *needs assessment, merdeka belajar, educational planning*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis asesmen kebutuhan dalam proses perencanaan pendidikan, khususnya dalam konteks kebijakan Merdeka Belajar. Dalam sistem pendidikan yang terus mengalami transformasi, asesmen

kebutuhan menjadi fondasi penting untuk merancang perencanaan yang relevan, adaptif, dan berbasis pada kondisi riil peserta didik serta satuan pendidikan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi literatur dari berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa asesmen kebutuhan mampu mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi aktual dalam berbagai aspek pendidikan, seperti kompetensi siswa, kesiapan guru, serta sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Kebijakan Merdeka Belajar memberikan keleluasaan bagi sekolah dan guru dalam menyusun kurikulum dan pembelajaran yang kontekstual. Namun, tanpa asesmen kebutuhan yang tepat, perencanaan yang disusun berpotensi tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Temuan juga menunjukkan bahwa implementasi asesmen kebutuhan di sekolah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kompetensi guru, minimnya waktu, dan rendahnya dukungan kelembagaan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penguatan seperti pelatihan guru, pengembangan instrumen asesmen yang praktis, dan integrasi hasil asesmen ke dalam dokumen perencanaan sekolah. Dengan demikian, asesmen kebutuhan tidak hanya menjadi alat identifikasi masalah, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan yang efektif dalam perencanaan pendidikan yang berorientasi pada kualitas dan pemerataan pembelajaran. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di era Merdeka Belajar.

Kata kunci: asesmen kebutuhan, merdeka belajar, perencanaan pendidikan

A. Pendahuluan

Dalam menghadapi dinamika perubahan global, sistem pendidikan Indonesia dituntut untuk melakukan transformasi mendalam guna menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman (Suryana, 2020). Perubahan ini tidak hanya meliputi aspek kurikulum, tetapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang menekankan pada kemandirian belajar peserta didik (Wulandari, 2021). Oleh karena itu, strategi perencanaan pendidikan yang adaptif dan berbasis data menjadi hal yang

sangat krusial di era Merdeka Belajar saat ini (Hasibuan, 2024). Pendidikan berkualitas untuk mencetak generasi emas di tahun 2045 adalah jargon dan tujuan mulia yang digaungkan pemerintah dan menjadi salah satu tujuan dilaksanakannya rangkaian pendidikan dan pembelajaran di sekolah melalui beragam cara (Wulandari *et al.*, 2025).

Pendidikan di abad ke-21 tidak lagi hanya bertumpu pada transfer pengetahuan, melainkan lebih kepada pengembangan karakter, kompetensi, serta kemampuan berpikir kritis dan

kreatif (Utami, 2019). Dalam konteks tersebut, perencanaan pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan nyata peserta didik dan lingkungan belajarnya (Kusuma, 2021). Hal ini menuntut pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis bukti (*evidence-based planning*).

Salah satu pendekatan yang penting dalam penyusunan rencana pendidikan adalah asesmen kebutuhan (*need assessment*), yang merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal yang diharapkan (Mulyadi, 2018). Dengan melakukan asesmen kebutuhan secara komprehensif, lembaga pendidikan dapat merancang intervensi yang tepat sasaran (Fitriani, 2022).

Asesmen kebutuhan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa perencanaan pendidikan tidak hanya berdasarkan asumsi semata, tetapi juga berakar pada realitas dan kebutuhan aktual yang dihadapi peserta didik dan guru (Nasution, 2019). Dalam konteks Merdeka Belajar, asesmen kebutuhan menjadi semakin penting karena kebijakan ini menekankan pada diferensiasi pembelajaran dan pemenuhan hak

belajar siswa (Rahmawati, 2023). Merdeka Belajar memberikan otonomi lebih kepada satuan pendidikan dan guru untuk mengembangkan proses pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik (Yuliani, 2020). Oleh karena itu, pemahaman yang akurat mengenai kebutuhan belajar menjadi fondasi utama dalam penyusunan program pendidikan yang efektif (Arifin, 2022). Tanpa pemetaan kebutuhan yang tepat, kebijakan Merdeka Belajar berisiko tidak dapat diimplementasikan secara optimal.

Secara umum, asesmen kebutuhan dalam perencanaan pendidikan mencakup aspek kognitif, afektif, sosial, serta lingkungan belajar peserta didik (Sari, 2021). Aspek-aspek ini saling berinteraksi dan perlu diperhatikan secara holistik agar menghasilkan perencanaan yang menyeluruh (Hidayat, 2020). Dengan demikian, asesmen kebutuhan dapat menjadi alat prediksi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan pendidikan.

Pada tingkat kebijakan, penting pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan untuk mendorong integrasi asesmen kebutuhan dalam proses perencanaan, baik di tingkat sekolah maupun daerah (Suharto, 2018).

Upaya ini dapat memperkuat peran kepala sekolah dan guru sebagai pelaksana kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan riil di lapangan (Rachmawati, 2021). Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi pendidikan yang dicanangkan dalam kebijakan Merdeka Belajar.

Secara khusus, pelaksanaan asesmen kebutuhan di satuan pendidikan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan kapasitas SDM dan infrastruktur pendukung (Zahra, 2022). Banyak sekolah yang belum memiliki perangkat asesmen yang memadai atau tenaga pendidik yang terlatih dalam melakukan analisis kebutuhan secara sistematis (Munir, 2023). Hal ini menjadi hambatan serius dalam optimalisasi perencanaan pendidikan.

Selain itu, belum semua guru memahami pentingnya asesmen kebutuhan sebagai dasar dari kegiatan pembelajaran yang terarah dan bermakna (Prasetya, 2020). Banyak yang masih mengandalkan rencana pembelajaran yang bersifat generik dan tidak disesuaikan dengan kondisi aktual peserta didik (Lestari, 2021). Padahal, keberhasilan pembelajaran sangat ditentukan oleh

sejauh mana guru mampu mengidentifikasi dan merespons kebutuhan siswanya secara tepat.

Permasalahan lainnya adalah kurangnya budaya refleksi dan evaluasi berkelanjutan dalam sistem pendidikan kita (Handayani, 2019). Akibatnya, proses perencanaan pendidikan cenderung bersifat top-down dan tidak berbasis pada data kontekstual (Siregar, 2023). Asesmen kebutuhan dapat menjadi jembatan untuk memperkuat pendekatan bottom-up dalam proses pengambilan keputusan pendidikan.

Dalam beberapa kasus, kebijakan Merdeka Belajar belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan satuan pendidikan untuk melakukan asesmen kebutuhan secara mandiri (Wibowo, 2020). Sebagian sekolah masih tergantung pada panduan dari pusat tanpa melakukan penyesuaian dengan kondisi lokal (Anggraini, 2022). Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas perencanaan berbasis kebutuhan di level sekolah.

Ketidaksesuaian kebutuhan aktual dengan perencanaan yang dibuat menyebabkan ketidakefisienan sumber daya dan rendahnya capaian pembelajaran (Fadillah, 2021). Oleh

karena itu, penting untuk menjadikan asesmen kebutuhan sebagai komponen utama dalam siklus perencanaan pendidikan (Ramadhan, 2024). Dengan demikian, kebijakan Merdeka Belajar dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan peserta didik.

Untuk menjawab tantangan tersebut, perlu ada kolaborasi antara pemerintah, dinas pendidikan, sekolah, dan lembaga pelatihan guru menyusun strategi implementasi asesmen kebutuhan yang sistematis dan berkelanjutan (Santoso, 2019). Langkah ini menjadi fondasi penting dalam memastikan perencanaan pendidikan yang efektif, adaptif, dan kontekstual.

Dengan melihat berbagai persoalan di atas, penelitian ini akan membahas secara mendalam tentang peran asesmen kebutuhan dalam optimalisasi perencanaan pendidikan di era Merdeka Belajar. Fokus utama diarahkan pada pentingnya perencanaan berbasis kebutuhan mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang fleksibel, adil, dan berorientasi pada kemajuan peserta didik secara menyeluruh (Hasibuan, 2024).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran secara mendalam mengenai peran asesmen kebutuhan dalam perencanaan pendidikan, khususnya dalam konteks kebijakan Merdeka Belajar.

Studi literatur dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, dokumen kebijakan, serta laporan penelitian yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk menghimpun informasi, pandangan, dan temuan terdahulu guna memperkuat analisis teoritis dan konseptual mengenai asesmen kebutuhan dalam pendidikan.

Pelaksanaan studi literatur dalam penelitian ini mencakup tiga tahapan utama. Pertama, peneliti menentukan topik dan fokus kajian secara spesifik agar proses pencarian literatur terarah. Kedua, peneliti mengumpulkan sumber-sumber dari berbagai media publikasi, baik cetak maupun digital. Ketiga, peneliti melakukan seleksi dan analisis

terhadap literatur yang diperoleh untuk digunakan sebagai dasar dalam menyusun pembahasan.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui akses digital terhadap repositori ilmiah, jurnal nasional dan internasional, serta publikasi dari lembaga pendidikan dan pemerintah.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Informasi dari setiap sumber diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang telah ditentukan, seperti urgensi asesmen kebutuhan, integrasi asesmen dalam perencanaan, dan tantangan implementasi di lapangan. Klasifikasi ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi pola dan hubungan antar konsep yang dikaji.

Proses analisis dilakukan secara deskriptif, dengan menguraikan temuan utama dari literatur yang telah dikaji, lalu menarik kesimpulan secara induktif berdasarkan kecenderungan data. Peneliti mengintegrasikan perspektif dari literatur yang berbeda untuk memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam.

Validitas hasil analisis dijaga melalui seleksi ketat terhadap literatur yang digunakan, memastikan hanya

sumber-sumber yang relevan dan berkualitas yang dijadikan bahan kajian. Selain itu, peneliti melakukan verifikasi silang antar sumber untuk menghindari bias dan memastikan konsistensi informasi.

Metode ini memungkinkan untuk merekonstruksi pemahaman tentang asesmen kebutuhan secara teoritis dan praktis, serta mengaitkannya dengan dinamika implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga reflektif terhadap kebijakan pendidikan yang sedang berlangsung.

Dengan pendekatan studi literatur, bertujuan menyajikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana asesmen kebutuhan dapat menjadi fondasi penting menyusun perencanaan yang responsif, adaptif, dan kontekstual sesuai dengan semangat Merdeka Belajar.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam upaya memahami dan mengoptimalkan perencanaan pendidikan di era Merdeka Belajar, asesmen kebutuhan menjadi titik awal yang krusial. Penelitian ini menelaah literatur yang mengungkapkan bagaimana asesmen kebutuhan berperan penting dalam menyusun

strategi pendidikan yang relevan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik serta dinamika satuan pendidikan. Pembahasan difokuskan pada keterkaitan antara konsep asesmen kebutuhan dengan praktik perencanaan pendidikan yang efektif, khususnya dalam kerangka kebijakan Merdeka Belajar.

1. Urgensi Asesmen Kebutuhan dalam Konteks Merdeka Belajar

Asesmen kebutuhan merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal yang diharapkan dalam suatu sistem pendidikan. Dalam konteks Merdeka Belajar, asesmen kebutuhan menjadi sangat penting karena kebijakan ini menekankan pada pembelajaran yang fleksibel, kontekstual, dan berbasis pada kondisi nyata peserta didik.

Perencanaan pendidikan yang tidak berbasis pada asesmen kebutuhan berisiko menghasilkan program yang tidak sesuai dengan realitas lapangan. Sering kali terjadi ketidaksesuaian antara rencana pembelajaran dan kondisi aktual, baik dari segi kemampuan siswa, sarana pendukung, maupun kesiapan guru.

Hal ini menyebabkan tidak optimalnya proses belajar dan lemahnya ketercapaian tujuan pendidikan.

Merdeka Belajar memberikan ruang bagi guru dan satuan pendidikan untuk menyusun rencana pembelajaran secara mandiri. Namun, tanpa data kebutuhan yang akurat, otonomi ini tidak akan berdampak maksimal. Asesmen kebutuhan menjadi dasar untuk menyusun kebijakan internal sekolah, mulai dari kurikulum operasional sekolah hingga strategi intervensi pembelajaran.

Lebih dari itu, asesmen kebutuhan juga dapat digunakan sebagai alat refleksi dan evaluasi bagi guru dan kepala sekolah. Dengan memanfaatkan hasil asesmen, sekolah dapat melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap program-program yang kurang efektif, dan memperkuat aspek-aspek yang sudah berjalan baik (Yuliani, 2020).

Dalam kerangka kebijakan Merdeka Belajar mengedepankan keadilan dan diferensiasi dalam pembelajaran, asesmen kebutuhan menempati posisi sentral. Ia tidak hanya menjadi titik awal perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen kontrol terhadap arah dan kualitas pembelajaran yang disusun.

2. Tantangan Implementasi Asesmen Kebutuhan di Sekolah

Meskipun urgensi asesmen kebutuhan telah disadari oleh banyak pihak, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya kapasitas guru dalam merancang dan melakukan asesmen yang tepat. Banyak guru belum terbiasa melakukan asesmen formatif secara sistematis untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik secara individual. Selain keterbatasan kompetensi, kendala lainnya adalah minimnya waktu dan beban administrasi yang tinggi.

Guru sering kali lebih fokus menyelesaikan tugas administratif dan dokumen kurikulum formal daripada pemetaan kebutuhan belajar siswa secara mendalam. Ini berdampak ketidakmampuan satuan pendidikan menghasilkan perencanaan yang berbasis data aktual.

Kurangnya fasilitas pendukung seperti perangkat asesmen, sistem manajemen data, dan pelatihan teknis juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua sekolah memiliki akses terhadap instrumen asesmen yang valid dan reliabel untuk mengukur kebutuhan belajar siswa. Akibatnya,

proses asesmen menjadi kurang akurat dan sulit dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

Selain dari sisi teknis, tantangan juga muncul dari aspek budaya sekolah. Di beberapa sekolah, asesmen masih dipahami sebatas alat pengukuran hasil belajar, bukan sebagai bagian dari proses identifikasi kebutuhan perencanaan strategis. Asesmen kebutuhan memiliki fungsi yang lebih luas, mencakup aspek kognitif, afektif, dan lingkungan belajar peserta didik (Fitriani, 2022). Untuk itu, dibutuhkan perubahan paradigma dan peningkatan kapasitas kelembagaan agar asesmen kebutuhan menjadi bagian integral dalam siklus manajemen pendidikan. Hal ini memerlukan intervensi kebijakan yang lebih serius dari pemerintah dan dinas pendidikan dalam bentuk pelatihan, monitoring, dan penguatan sistem asesmen sekolah.

3. Strategi Penguatan Peran Asesmen Kebutuhan dalam Perencanaan Pendidikan

Dalam rangka memperkuat implementasi asesmen kebutuhan di sekolah, strategi yang pertama dan paling mendasar adalah peningkatan kapasitas guru. Guru perlu dibekali

dengan keterampilan melakukan asesmen diagnostik, formatif, dan reflektif agar mampu mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa secara akurat dan menyeluruh. Pelatihan yang berkelanjutan dan berbasis praktik kontekstual sangat diperlukan.

Kedua, sekolah perlu mengintegrasikan hasil asesmen kebutuhan ke dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Sekolah (RKS), Program Tahunan, dan Perangkat Ajar. Ini akan menjamin bahwa hasil asesmen benar-benar digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar dokumen pelengkap atau formalitas administratif.

Ketiga, kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran harus mendorong terciptanya budaya reflektif dan kolaboratif dalam penyusunan program sekolah. Setiap guru perlu didorong untuk tidak hanya mengajar, tetapi menganalisis, merefleksi, merancang pembelajaran berdasarkan data kebutuhan peserta didik. Kolaborasi antar guru dan tim pengembang kurikulum menjadi kunci keberhasilan langkah ini (Hasibuan, 2024). Keempat, pemerintah dan dinas pendidikan perlu memperkuat sistem asesmen nasional dan daerah

yang mendukung pengumpulan data kebutuhan belajar secara sistematis. Sistem ini dapat berupa platform digital, aplikasi asesmen, atau panduan teknis yang mudah diakses sekolah. Dukungan sumber daya yang memadai juga diperlukan untuk menjamin pelaksanaan yang merata di seluruh satuan pendidikan.

Terakhir, evaluasi berkala terhadap efektivitas asesmen kebutuhan menunjang perencanaan pendidikan perlu dilakukan. Evaluasi ini tidak hanya untuk menilai keberhasilan program, tetapi sebagai dasar perbaikan kebijakan. Dengan begitu, sistem pendidikan kita dapat bergerak berkelanjutan menuju kualitas yang lebih baik dan merata.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa asesmen kebutuhan merupakan komponen strategis dalam optimalisasi perencanaan pendidikan, khususnya dalam kerangka kebijakan Merdeka Belajar. Asesmen ini menjadi dasar penting bagi satuan pendidikan untuk merancang kebijakan internal, strategi pembelajaran, serta program pengembangan yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik

secara nyata. Dalam konteks Merdeka Belajar yang menekankan fleksibilitas dan diferensiasi, asesmen kebutuhan memainkan peran sentral dalam menciptakan proses pembelajaran yang kontekstual dan bermakna.

Pelaksanaan asesmen kebutuhan yang baik memungkinkan guru dan sekolah memahami secara komprehensif potensi, kendala, dan kebutuhan belajar peserta didik. Namun demikian, praktik di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan pemahaman guru, minimnya fasilitas asesmen, hingga budaya sekolah yang belum sepenuhnya mendukung pendekatan berbasis kebutuhan. Ketidaksiapan sistem dan sumber daya ini menyebabkan banyak perencanaan pendidikan yang disusun belum mencerminkan realitas aktual di ruang kelas dan lingkungan belajar peserta didik.

Ketimpangan kapasitas antarwilayah menjadi persoalan penerapan asesmen kebutuhan sebagai basis perencanaan. Beberapa daerah memiliki sumber daya dan akses pelatihan yang lebih baik, sementara daerah lain mengalami keterbatasan pelaksanaan asesmen dan pemanfaatan hasilnya.

Hal ini berdampak pada kualitas dan relevansi perencanaan pendidikan yang tidak merata antarwilayah, sehingga bertolak belakang dengan semangat keadilan pendidikan yang diusung oleh Merdeka Belajar.

Upaya optimalisasi peran asesmen kebutuhan menuntut adanya strategi penguatan mencakup peningkatan kapasitas guru, pengembangan sistem asesmen yang praktis dan kontekstual, serta dukungan kebijakan yang mendorong penggunaan hasil asesmen dalam seluruh siklus perencanaan pendidikan. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran juga memiliki peran penting dalam membangun budaya reflektif dan pemanfaatan data asesmen secara berkelanjutan dalam pengambilan keputusan strategis di sekolah. Dengan demikian, asesmen kebutuhan tidak boleh diposisikan sebagai instrumen pelengkap, melainkan harus menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pendidikan yang adaptif, berbasis data, serta responsif terhadap kondisi lokal. Dukungan sistemik dari pemerintah, peningkatan kapasitas aktor pendidikan, serta penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan

perencanaan pendidikan yang efektif dan merata di seluruh Indonesia pada era Merdeka Belajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D. (2022). *Kesiapan Sekolah Menghadapi Kurikulum Merdeka*. Yogyakarta: Deepublish.
- Arifin, M. (2022). *Desain Pembelajaran Diferensiatif dalam Merdeka Belajar*. Bandung: Alfabeta.
- Fadillah, R. (2021). *Manajemen Sumber Daya Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fitriani, N. (2022). *Asesmen Kebutuhan dalam Pendidikan*. Malang: UMM Press.
- Handayani, E. (2019). *Refleksi dan Evaluasi dalam Proses Pendidikan*. Surabaya: Unesa Press.
- Hasibuan, A. (2024). *Perencanaan Pendidikan Berbasis Data di Era Merdeka Belajar*. Jakarta: Prenada Media.
- Hidayat, R. (2020). *Psikologi Pendidikan dan Lingkungan Belajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kusuma, D. (2021). *Kurikulum dan Perencanaan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lestari, T. (2021). *Strategi Pembelajaran Kontekstual*. Semarang: Unnes Press.
- Mulyadi, T. (2018). *Pengantar Perencanaan Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Munir, F. (2023). *Tantangan Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar*. Bandung: Alfabeta.
- Nasution, A. (2019). *Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prasetya, B. (2020). *Guru sebagai Agen Perubahan Pendidikan*. Malang: UB Press.
- Rahmawati, L. (2023). *Implementasi Merdeka Belajar dalam Pembelajaran Sekolah*. Surakarta: UNS Press.
- Rachmawati, I. (2021). *Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Perencanaan Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Santoso, H. (2019). *Kolaborasi Pendidikan Berbasis Komunitas*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Sari, A. (2021). *Analisis Kebutuhan Belajar Siswa di Sekolah*. Bandung: Graha Ilmu.
- Siregar, M. (2023). *Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Medan: USU Press.
- Suharto, D. (2018). *Desentralisasi dan Otonomi Pendidikan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Suryana, A. (2020). *Transformasi Pendidikan di Era Digital*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Utami, L. (2019). *Keterampilan Abad 21 dalam Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibowo, S. (2020). *Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka di Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wulandari, R. (2021). *Desain Pembelajaran Berbasis Merdeka Belajar*. Malang: UMM Press.

- Wulandari, Y. N., Suriansyah, A., & Sulistiyana, S. (2025). Manajemen Pembelajaran Transisi PAUD ke SD untuk Optimalisasi Kegiatan Pembelajaran yang Berkualitas pada Jenjang PAUD dan SD Kelas Awal. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(9), 6905–6910.
- Yuliani, E. (2020). *Otonomi Guru dan Satuan Pendidikan di Era Merdeka Belajar*. Jakarta: Prenada Media.
- Zahra, M. (2022). *Problematisa Perencanaan Pendidikan di Sekolah*. Bandung: Alfabeta.